



Peran pendidikan dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia pasca pandemi COVID 19

Mohammad Ja'far Firdaus¹, Nur Khasanah²

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: mohammad.jafar.firdaus24065@mhs.uingusdur.ac.id¹,

nur.khasanah@uingusdur.ac.id²

Corresponding Author: mohammad.jafar.firdaus24065@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Gender equality is one of the main pillars of sustainable development, especially in developing countries like Indonesia recovering from the COVID-19 pandemic. This article examines the role of education in promoting gender equality post-pandemic through literature analysis and current empirical data. Education is considered a key instrument to change social norms, increase access to economic opportunities, and reduce gender stereotypes exacerbated by remote learning during the pandemic. Based on a review of Indonesia's education policies, such as the 2013 Curriculum and post-COVID education recovery programs, education can facilitate women's participation in STEM fields and leadership. However, challenges such as increased domestic burdens on women and digital divides remain obstacles. This article recommends strengthening inclusive curricula, equitable technology access, and teacher training to promote broader gender equality in the post-pandemic era.

Keywords: Gender equality, Education, Post-COVID-19 pandemic, Social norms.

ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang pulih dari dampak pandemi COVID-19. Artikel ini mengkaji peran pendidikan dalam meningkatkan kesetaraan gender pasca pandemi melalui analisis literatur dan data empiris terkini. Pendidikan dianggap sebagai instrumen kunci untuk mengubah norma sosial, meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, dan mengurangi stereotip gender yang diperburuk oleh pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti Kurikulum 2013 dan program pemulihan pendidikan pasca-COVID, pendidikan dapat memfasilitasi partisipasi perempuan dalam bidang STEM dan kepemimpinan. Namun, tantangan seperti peningkatan beban domestik perempuan dan kesenjangan digital masih menjadi hambatan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kurikulum inklusif, akses teknologi yang setara, dan pelatihan guru untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih luas di era pasca pandemi.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Pendidikan, Pasca pandemi COVID-19, Norma sosial.



PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah menjadi agenda global yang diakui dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Tujuan 5 yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (United Nations, 2015). Di Indonesia, kesetaraan gender masih menghadapi tantangan signifikan, seperti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan, serta stereotip gender yang mendarah daging dalam masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2022). Pandemi COVID-19 telah memperburuk ketidaksetaraan ini, dengan pembelajaran jarak jauh yang meningkatkan beban domestik perempuan dan kesenjangan akses teknologi (UNESCO, 2021). Pendidikan, sebagai salah satu sektor utama pembangunan manusia, memiliki potensi besar untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dengan cara membentuk nilai-nilai, keterampilan, dan kesadaran generasi muda di era pasca pandemi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Melalui tinjauan literatur dan analisis data empiris, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan dapat menjadi katalisator perubahan sosial dalam konteks pemulihan dari pandemi. Hipotesis utama adalah bahwa pendidikan yang inklusif dan berbasis kesetaraan dapat mengurangi disparitas gender dalam akses, partisipasi, dan hasil pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesetaraan gender yang lebih luas di masyarakat pasca pandemi.

Kesetaraan gender dalam pendidikan merujuk pada kesamaan akses, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dari sistem pendidikan, terutama dalam konteks pemulihan dari pandemi (UNESCO, 2017). Menurut teori feminisme liberal, pendidikan adalah alat untuk membebaskan individu dari norma patriarki yang membatasi perempuan (Friedan, 1963). Di Indonesia, studi-studi empiris menunjukkan bahwa pendidikan perempuan berkorelasi positif dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan, namun pandemi COVID-19 telah memperlebar kesenjangan ini melalui pembelajaran daring yang tidak setara (World Bank, 2020). Tantangan seperti segregasi gender dalam pendidikan tinggi, di mana perempuan kurang terwakili di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), masih menjadi masalah, diperburuk oleh akses internet yang terbatas di daerah pedesaan (OECD, 2019).

Pendidikan berperan penting dalam mengubah norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender, terutama setelah pandemi yang meningkatkan stereotip tentang peran perempuan sebagai pengasuh utama. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender, siswa dapat belajar tentang hak asasi manusia dan kesetaraan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2017). Di Indonesia, program seperti "Sekolah Ramah Anak" dan "Pendidikan Inklusif" telah diperkenalkan untuk mempromosikan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi gender, dengan penekanan pada pemulihan pasca-COVID melalui akses teknologi yang setara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).



Namun, penelitian menunjukkan bahwa tanpa pelatihan guru yang memadai, implementasi kurikulum ini sering kali tidak efektif, terutama dalam konteks pembelajaran hybrid (Suryadarma & Jones, 2013).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah perempuan di tingkat dasar mencapai 98%, namun di tingkat tinggi, perempuan hanya 45% dari mahasiswa STEM, dengan pandemi memperburuk kesenjangan ini melalui dropout yang lebih tinggi di kalangan perempuan (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini disebabkan oleh stereotip gender yang diajarkan sejak dini, seperti ekspektasi bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik, yang diperkuat oleh beban tambahan selama lockdown (Murniati, 2018). Peluang terletak pada kebijakan seperti Kurikulum 2013, yang menekankan pembelajaran aktif dan inklusif, serta program wajib belajar 12 tahun yang meningkatkan akses pendidikan, dengan inisiatif pemulihan seperti distribusi perangkat digital untuk mengatasi kesenjangan gender (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Laporan UNESCO (2021) menekankan bahwa pendidikan pasca pandemi harus fokus pada inklusi gender untuk mencegah regresi dalam pencapaian kesetaraan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif berdasarkan tinjauan literatur sistematis. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti laporan BPS, UNESCO, dan World Bank, serta studi akademik dari jurnal terindeks Sinta, dengan fokus pada publikasi pasca-2020 yang membahas dampak COVID-19. Kriteria inklusi meliputi publikasi dari tahun 2010 hingga 2023 yang relevan dengan topik kesetaraan gender, pendidikan, dan pandemi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tantangan, dan rekomendasi dari literatur tersebut. Metode ini dipilih karena topik ini lebih cocok untuk eksplorasi konseptual daripada penelitian empiris lapangan, dengan penekanan pada data terkini pasca pandemi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akses dan Partisipasi Pendidikan Pasca Pandemi

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa pendidikan telah berperan besar dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan formal. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan berupa penurunan tingkat partisipasi, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Data Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa pada tahun 2022, rasio partisipasi sekolah perempuan di tingkat dasar mencapai 99%, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berada pada angka 97%. Meskipun demikian, angka putus sekolah perempuan meningkat sebesar 15% selama pandemi berlangsung. Di tingkat pendidikan tinggi, kesenjangan semakin terlihat: hanya sekitar 48% mahasiswa universitas merupakan perempuan, dan terdapat pemisahan yang jelas di fakultas-fakultas berbasis sains dan teknologi (OECD, 2019).



Upaya untuk memperkuat kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan afirmatif, misalnya pemberian beasiswa khusus bagi perempuan di bidang STEM. Salah satu contohnya adalah program Beasiswa Unggulan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021), yang setelah pandemi diperluas untuk mendukung proses pemulihan pendidikan nasional. Selain itu, penyediaan akses teknologi yang adil—seperti pemberian laptop dan layanan internet gratis—berpotensi mengurangi kesenjangan gender yang semakin lebar akibat sistem pembelajaran daring (UNESCO, 2021).

Ketimpangan digital menjadi tantangan baru dalam mendorong partisipasi perempuan di dunia pendidikan. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan jaringan internet di daerah tertinggal membuat sebagian besar siswa perempuan kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur digital yang inklusif serta peningkatan kompetensi digital bagi guru dan siswa perempuan menjadi langkah penting dalam memastikan kesetaraan pendidikan di era pasca pandemi.

Kurikulum pendidikan yang berperspektif gender juga perlu dikembangkan agar kesempatan belajar bagi perempuan tidak hanya terbuka secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas. Pendekatan inklusif dapat dilakukan melalui program mentoring, kegiatan penelitian kolaboratif, dan dukungan karier bagi mahasiswi di bidang STEM. Dengan demikian, upaya memperluas partisipasi perempuan di pendidikan tinggi harus diiringi dengan penciptaan ruang akademik yang setara, aman, dan mendukung pengembangan potensi perempuan secara penuh.

Selain dukungan dari pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Kemitraan dalam penyediaan fasilitas belajar digital, pelatihan vokasional, serta pendanaan pendidikan akan membantu mempercepat pemulihan kesetaraan pendidikan. Sinergi lintas sektor ini dapat memperkuat keberlanjutan partisipasi perempuan, menjadikan pendidikan sebagai sarana utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil gender.

B. Pengurangan Stereotip Gender Pasca Pandemi

Pendidikan memiliki peranan penting dalam mengikis stereotip gender melalui pengajaran nilai-nilai kesetaraan. Hal ini semakin relevan setelah pandemi COVID-19 memperkuat kembali norma-norma patriarki di sejumlah lingkungan sosial. Temuan penelitian Suryadarma dan Jones (2013) memperlihatkan bahwa peserta didik yang terpapar kurikulum inklusif cenderung memiliki pandangan positif terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Namun, kondisi pembelajaran jarak jauh selama pandemi menunjukkan perlunya penyesuaian pendekatan agar nilai-nilai kesetaraan tetap dapat tersampaikan secara efektif. Di Indonesia, Kurikulum 2013 telah memasukkan aspek hak dan kesetaraan gender, meski keberhasilannya masih sangat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran guru dan ketersediaan teknologi.

Untuk memperkuat peran pendidikan dalam mengurangi stereotip gender, pelatihan bagi guru menjadi langkah strategis. Guru yang memahami isu kesetaraan gender dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menantang norma patriarki yang masih mengakar di sekolah. Pelatihan berbasis daring



memungkinkan jangkauan lebih luas, terutama bagi guru di daerah terpencil, sehingga mereka dapat mengimplementasikan praktik pengajaran yang lebih adil gender setelah pandemi.

Perubahan paradigma pendidikan juga menuntut pendekatan pedagogis yang kritis dan partisipatif. Integrasi nilai-nilai kesetaraan gender sebaiknya tidak hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu, tetapi diterapkan secara menyeluruh dalam proses belajar. Misalnya, melalui penggunaan studi kasus perempuan berprestasi, diskusi reflektif tentang peran sosial, dan penugasan yang menumbuhkan empati terhadap isu gender. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi sebagai media pembentuk kesadaran sosial yang menolak diskriminasi berbasis gender.

Penting pula untuk memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Lingkungan sosial yang mendukung nilai kesetaraan akan mempercepat perubahan pola pikir generasi muda. Pelibatan tokoh masyarakat, media lokal, dan organisasi perempuan dalam kampanye pendidikan kesetaraan dapat memperluas dampaknya hingga ke tingkat akar rumput. Dengan dukungan lintas sektor tersebut, pendidikan pasca pandemi dapat menjadi katalis bagi perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil gender.

C. Dampak pada Kesetaraan Sosial dan Ekonomi Pasca Pandemi

Pendidikan perempuan terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesetaraan sosial dan ekonomi. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan beban domestik bagi perempuan, yang secara tidak langsung mengurangi waktu mereka untuk belajar dan bekerja. Data World Bank (2020) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan berpendidikan tinggi mencapai 70%, jauh di atas perempuan berpendidikan rendah yang hanya 50%. Akan tetapi, angka ini mengalami penurunan selama pandemi. Di sisi lain, pendidikan terbukti menurunkan angka perkawinan dini di Indonesia, tetapi situasi pandemi justru meningkatkan kembali praktik tersebut (United Nations, 2015).

Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan. Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan menjadi penting untuk memastikan sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi semua peserta didik. Selain itu, program pemulihan pasca pandemi harus diintegrasikan dengan kampanye kesadaran gender melalui media digital, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan perempuan bagi kemajuan sosial dan ekonomi (UNESCO, 2021).

Pendidikan yang setara berperan dalam membuka akses ekonomi bagi perempuan, terutama dalam konteks dunia kerja pasca pandemi yang semakin berbasis digital. Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan teknologi dan kewirausahaan daring dapat membantu perempuan beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja. Program seperti Kartu Prakerja dapat diarahkan lebih spesifik untuk perempuan muda sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi inklusif.



Lebih jauh, kebijakan perlindungan sosial perlu diperkuat agar pendidikan perempuan dapat berlanjut dalam situasi krisis apa pun. Dukungan seperti bantuan pendidikan anak perempuan, pengawasan terhadap perkawinan usia dini, serta penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender akan memperkuat keberlanjutan kesetaraan sosial-ekonomi. Dengan pendekatan terintegrasi antara sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial, pendidikan pasca pandemi dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkeadilan dan berperspektif gender.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika akses dan partisipasi pendidikan, khususnya bagi perempuan. Meskipun capaian pendidikan perempuan di tingkat dasar menunjukkan kemajuan yang cukup tinggi, kesenjangan tetap muncul pada jenjang pendidikan tinggi, terutama di bidang STEM. Ketimpangan digital selama pandemi memperburuk hambatan yang ada, menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung pemerataan akses teknologi dan pemberian beasiswa afirmatif bagi perempuan. Dengan demikian, pemulihan pendidikan pasca pandemi harus diarahkan pada penguatan infrastruktur digital dan pemberdayaan perempuan melalui kebijakan inklusif yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan belajar.

Selanjutnya, peran pendidikan dalam mengurangi stereotip gender menjadi semakin krusial pasca pandemi. Integrasi materi kesetaraan gender dalam kurikulum formal dan pelatihan guru merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran kritis terhadap peran perempuan di masyarakat. Pembelajaran berbasis digital dapat menjadi media efektif dalam menyebarkan nilai-nilai kesetaraan, asalkan didukung oleh peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa. Kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan bebas dari bias gender.

Dari sisi sosial ekonomi, pendidikan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan, meskipun pandemi sempat menghambat capaian tersebut. Pendidikan yang setara tidak hanya membuka akses terhadap pasar kerja, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pemulihan pasca pandemi harus menekankan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Secara keseluruhan, pendidikan pasca pandemi memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara gender. Upaya untuk memperkuat akses, menurunkan stereotip, dan meningkatkan dampak sosial ekonomi pendidikan perempuan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui kebijakan yang terintegrasi antara bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Hanya dengan demikian, pendidikan dapat benar-benar menjadi motor penggerak kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan di era pasca pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik pendidikan Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Friedan, B. (1963). *The feminine mystique*. New York: W.W. Norton & Company. Diakses dari <https://www.amazon.com/Feminine-Mystique-Betty-Friedan/dp/0393322572>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Kurikulum 2013: Panduan implementasi*. Jakarta: Kemendikbud. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/kurikulum-2013>
- OECD. (2019). *Education at a glance 2019: OECD indicators*. Paris: OECD Publishing.
- Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2013). *Education and gender equality in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(3), 349-375.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: UN.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2017). *A guide for gender equality in teacher education policy and practices*. Paris: UNESCO. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247784>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). *Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action*. Paris: UNESCO. Diakses dari <https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures>
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *Indonesia gender assessment*. Washington, DC: World Bank.